



4.1 Analisis Data Deskriptif

Data yang digunakan merupakan data yang diambil dari tahun 2011-2015 dengan objek penelitian 4 (empat) daerah di Jawa Barat yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Data yang digunakan diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, dan Pusdalisbang. Data yang digunakan untuk melihat pendapatan regional yang bertujuan menganalisa tingkat efisiensi keuangan daerah

menggunakan variabel input Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Sedangkan variabel output yang digunakan untuk mengukur suatu perekonomian dengan menggunakan beberapa indikator yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hasil semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi suatu daerah yang dipungut sesuai peraturan daerah. Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 4 daerah di Jawa Barat yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Data dalam penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik di setiap daerah.

Tabel 4. 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Daerah di Jawa Barat

tahun	Daerah (ribu rupiah)				rata-rata
	Kota Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung Barat	Kota Cimahi	
2011	834.595.865	291.062.396	94.606.169	116.677.729	334.235.539,75
2012	1.005.583.425	366.316.690	136.241.257	144.540.602	413.170.493,5

2013	1.442.775.239	507.243.684	187.170.467	191.599.456	582.197.211,5
2014	1.716.057.298	702.045.373	248.697.186	227.949.120	723.687.244,25
2015	1.859.694.644	784.216.215	314.621.269	268.816.074	806.837.050,5
rata-rata	1.371.741.294,2	530.176.871,6	196.267.269,6	189.916.596,2	572.025.507,9

Source Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data yang diperoleh seperti pada tabel 4.1 diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah di tiap daerah di Jawa Barat memiliki jumlah yang berbeda sesuai kebutuhan dan pengeluaran di tiap daerah itu sendiri. Daerah yang mempunyai nominal Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi adalah Kota Bandung pada tahun 2011 dimana mencapai Rp834.595.865 meningkat pada tahun 2012 sebesar Rp1.005.583.425. Akan tetapi pada tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut, Kota Bandung mempunyai PAD lebih rendah dibandingkan rata-rata PAD dari tahun 2011 hingga 2015 sebesar Rp1.371.741.294,2. Kemudian Kota Bandung mengalami kenaikan kembali pada tahun 2013 sebesar Rp1.442.775.239 dan kembali meningkat pada tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar Rp1.716.057.298 dan Rp1.859.694.644. Penerimaan terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung berasal dari pajak daerah, salah satu jenis pajak penyumbang terbesar adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2011

sebesar Rp306.250.907 dan terus meningkat hingga tahun 2015 sebesar Rp488.000.000.

Kemudian, daerah yang mempunyai nominal Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah adalah Kabupaten Bandung Barat dimana mencapai Rp94.606.169 dan mengalami kenaikan pada tahun 2012 sebesar Rp136.241.257 kemudian mengalami kenaikan berturut-turut hingga tahun 2015 sebesar Rp187.170.467, Rp248.697.186, Rp314.621.269. Rata-rata PAD Kabupaten Bandung Barat pada rentang tahun 2011 hingga tahun 2015 adalah Rp196.267.269,6. Kabupaten Bandung Barat hanya memiliki Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah di tahun 2013 sebesar Rp100.000, maka dari itu menyebabkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat lebih rendah dibanding daerah lainnya yang memiliki kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. Akan tetapi pada tahun 2015 Kabupaten Bandung Barat tidak lagi menjadi daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah. Pada tahun 2015, Kota Cimahi memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah yang mempunyai nominal Rp268.816.074. Kota Cimahi dari tahun 2011 juga terus mengalami peningkatan PAD dan mempunyai rata-rata sebesar Rp189.916.596,2. Untuk daerah Kabupaten Bandung mengalami kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berturut-turut dari tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp291.062.396, Rp366.316.690, Rp507.243.684, Rp702.045.373, Rp784.216.215 dan mempunyai rata-rata PAD sebesar Rp530.176.871,6.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 daerah di Jawa Barat tahun 2011 hingga tahun 2015 memiliki rata-rata keseluruhan sebesar Rp572.025.507,9, dimana hanya Kota Bandung dan Kabupaten Bandung yang memiliki PAD diatas rata-rata.

4.1.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan sumber dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi. Berikut adalah data Dana Perimbangan di 4 daerah di Jawa Barat yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Data dalam penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik di setiap daerah.

Tabel 4. 2 Dana Perimbangan 4 daerah di Jawa Barat (2011-2015)

Tahun	Daerah (ribu rupiah)				rata-rata
	Kota Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung Barat	Kota Cimahi	
2011	1.405.392.570	1.511.351.819	809.660.453	422.164.126	1.037.142.242
2012	1.807.075.186	1.954.099.528	977.452.867	541.183.364	1.319.952.736,25
2013	1.778.972.208	2.104.760.856	1.043.185.355	570.893.914	1.374.453.083,25
2014	1.886.016.264	2.261.962.786	1.494.604.202	625.419.291	1.567.000.635,75

2015	1.765.831.826	3.735.810.392	1.159.888.702	628.232.060	1.822.440.745
rata-rata	1.728.657.610,8	2.313.597.076,2	1.096.958.315,8	557.578.551	1.424.197.888,45

Source: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan pada tabel 4.2 diketahui bahwa Dana Perimbangan di beberapa daerah di Jawa Barat mengalami perubahan di setiap tahunnya, dibuktikan pada tahun 2011 Dana Perimbangan terbesar diperoleh Kabupaten Bandung sebesar Rp1.511.351.819, lalu meningkat pada tahun 2012 sebesar Rp1.954.009.528, kemudian terus meningkat berturut-turut hingga tahun 2015 sebesar Rp2.104.760.856, Rp2.261.962.786, Rp3.735.810.392. Rata-rata PAD Kabupaten Bandung dari tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp2.313.597.076,2 yang juga merupakan rata-rata PAD paling tinggi dibanding 3 daerah lainnya. Adapun penerimaan terbesar Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah itu sendiri untuk menunjang keuangan daerah sehingga terlaksananya desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Bandung berturut-turut dari tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp1.202.706.641, Rp1.518.230.253, Rp1.730.063.709, Rp1.897.769.300, Rp1.957.538.845. Adapun Dana Perimbangan terendah adalah Kota Cimahi. Sesuai luas wilayah, Kota Cimahi lebih kecil dibandingkan beberapa daerah lain di Jawa Barat. Hal ini dibuktikan Kota Cimahi hanya memiliki 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Sejalan dengan itu,

maka Kota Cimahi mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) lebih rendah dibandingkan daerah lain. Sehingga dapat disimpulkan Dana Perimbangan Kota Cimahi memiliki nominal terendah. Pada tahun 2011, Kota Cimahi menerima Dana Perimbangan sebesar Rp422.164.126, kemudian tahun 2012 sebesar Rp541.183.364, tahun 2013 sebesar Rp570.893.914, tahun 2014 sebesar Rp625.419.291, dan tahun 2015 sebesar Rp628.232.060. Pada Kota Bandung, penerimaan Dana Perimbangan mengalami fluktuasi di tiap tahunnya, yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp1.405.392.570, tahun 2012 sebesar Rp1.807.075.186, tahun 2013 sebesar Rp1.778.972.208, tahun 2014 sebesar Rp1.886.016.264 dan pada tahun 2015 sebesar Rp1.765.831.826. Rata-rata PAD Kota Cimahi dari tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp557.578.551 yang sangat jauh nominalnya dibandingkan rata-rata Dana Perimbangan di 3 daerah lainnya. Kemudian untuk Kabupaten Bandung Barat mempunyai Dana Perimbangan berturut-turut dari tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp809.660.453, Rp977.452.867, Rp1.043.185.355, Rp1.494.604.202, Rp1.159.888.702 dan rata-rata sebesar Rp1.096.958.315,8 yang masih berada dibawah rata-rata keseluruhan Dana Perimbangan 4 daerah di Jawa Barat tahun 2011 hingga tahun 2015.

Rata-rata keseluruhan Dana Perimbangan di 4 daerah di Jawa Barat pada tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp1.424.197.888,45, adapun hanya Kota Bandung dan Kabupaten Bandung saja yang menerima Dana Perimbangan diatas rata-rata.

4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber diluar retribusi daerah, pajak daerah, maupun hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Berikut adalah data Lain-Lain Pendapatan Yang Sah di 4 daerah di Jawa Barat yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Data dalam penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik di setiap daerah dari tahun 2011 hingga tahun 2015:

**Tabel 4. 3 Lain-Lain Pendapatn Yang Sah 4 Daerah di Jawa Barat
(2011-2015)**

Tahun	Daerah (ribu rupiah)				rata-rata
	Kota Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung Barat	Kota Cimahi	
2011	875.308.088	140.494.956	87.853.711	138.935.575	310.648.082,5
2012	854.034.799	103.201.045	72.383.936	186.828.596	304.112.094
2013	1.110.341.500	136.250.840	441.006.518	212.856.825	475.113.920,75
2014	1.351.867.067	1.074.769.667	401.229.408	263.765.853	772.907.998,75
2015	1.472.545.447	3.775.740.893	701.316.892	289.747.755	1.559.837.746,75

rata-rata	1.132.819.380,2	1.046.091.480,2	340.758.093	218.426.920,8	684.523.968,55

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan pada tabel 4.3 diketahui bahwa setiap daerah menerima Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang dipengaruhi dari beberapa sektor seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi ke daerah lainnya, dana hibah, dana darurat, dana penyesuaian otonomi khusus dan lainnya. Daerah yang menerima lain-lain pendapatan yang sah terbesar ialah Kota Bandung, dibuktikan pada tahun 2011 Kota Bandung menerima lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp875.308.088, kemudian pada tahun 2012 meningkat mencapai Rp854.034.799 dan terus meningkat berturut-turut hingga tahun 2015 sebesar Rp1.110.341.500, Rp1.351.867.067, Rp1.472.545.447. Rata-rata lain-lain pendapatan yang sah Kota Bandung tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp1.132.819.380,2.

Daerah yang menerima lain-lain pendapatan yang sah terendah ialah Kabupaten Bandung Barat, dibuktikan pada tahun 2011 dan 2012 menerima lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp87.853.711 dan Rp72.383.936. Akan tetapi pada tahun 2013 hingga tahun 2015 Kabupaten Bandung Barat tidak lagi menjadi penerima lain-lain pendapatan yang sah terendah karena mengalami peningkatan nominal yang cukup tinggi berturut-turut sebesar Rp441.006.518, Rp401.229.408, dan Rp701.316.892. Rata-rata keseluruhan lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Bandung Barat tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp340.758.093.

Kemudian Kota Cimahi pada tahun 2011 menerima lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp138.935.575, dan pada tahun 2012 sebesar Rp186.828.596. Kemudian pada tahun 2013 hingga tahun 2015, Kota Cimahi menjadi daerah yang menerima lain-lain pendapatan yang sah terendah menggantikan Kabupaten Bandung Barat, dibuktikan berturut-turut penerimaan lain-lain pendapatan yang sah Kota Cimahi tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp212.856.825, Rp263.765.853, Rp289.747.755 dan mendapatkan rata-rata keseluruhan lain-lain pendapatan yang sah Kota Cimahi tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp218.426.920,8 yang juga menandakan bahwa Kota Cimahi berada di posisi terendah dibandingkan rata-rata 3 daerah lainnya. Kemudian Kabupaten Bandung menerima lain-lain pendapatan yang sah berturut-turut dari tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp140.494.956, Rp103.201.045, Rp136.250.840, Rp1.074.769.667, Rp3.775.740.893. Maka, rata-rata lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Bandung tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp1.046.091.480,2.

4.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator suatu daerah yang menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari periode tertentu ke periode sebelumnya. Berikut adalah data yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi di 4 daerah di Jawa Barat yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi. Data dalam penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik di setiap daerah tahun 2011 hingga tahun 2015.

Tabel 4. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi 4 daerah di Jawa Barat (2011-2015)

tahun	Daerah (dalam persentase)				
	Kota Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung Barat	Kota Cimahi	rata-rata
2011	8,73%	5,94%	5,75%	5,5%	6,48%
2012	8,98%	6,15%	6,04%	6,24%	6,85%
2013	8,87%	5,92%	5,94%	5,65%	6,59%
2014	7,71%	5,91%	5,71%	5,49%	6,21%
2015	7,63%	5,89%	5,01%	5,43%	5,99%
rata-rata	8,35%	5,96%	5,69%	5,67%	6,42%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 4.4 data yang diperoleh merupakan laju pertumbuhan ekonomi di 4 daerah di Jawa Barat tahun 2011 hingga tahun 2015. Diketahui bahwa setiap daerah mengalami fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya, adapun Kota Bandung pada tahun 2011 mencapai 8,73% dan mengalami kenaikan menjadi 8,98% dikarenakan kenaikan pada beberapa lapangan usaha seperti

bangunan, listrik, perdagangan, komunikasi, dan keuangan. Namun, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung terus mengalami penurunan di tahun 2013 hingga tahun 2015 sebesar 8,87%, 7,71%, 7,63% yang disebabkan menurunnya lapangan usaha pengadaan listrik dan perusahaan jasa baik pemerintah maupun swasta yang cukup tinggi.

Daerah yang mempunyai laju pertumbuhan terendah adalah Kota Cimahi, dibuktikan pada tahun 2011 mencapai 5,5%, kemudian meningkat menjadi 6,24%. Akan tetapi pada tahun 2013 hingga 2015 terus mengalami penurunan berturut-turut sebesar 5,65%, 5,49%, 5,43% yang disebabkan oleh beberapa lapangan usaha seperti informasi dan komunikasi pada tahun 2015 mencapai 17,59% yang mengalami penurunan sebesar 0,9% dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk Kabupaten Bandung juga mengalami fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi, dibuktikan pada tahun 2011 sebesar 5,94% lalu mengalami peningkatan di tahun 2012 sebesar 6,15%. pada tahun 2013 hingga tahun 2015, Kabupaten Bandung mengalami penurunan laju pertumbuhan berturut-turut sebesar 5,92%, 5,91%, 5,01% dan mempunyai rata-rata sebesar 5,96%, maka menunjukkan Kabupaten Bandung berada dibawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di 4 daerah di Jawa Barat. Untuk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2011 dan tahun 2012 mengalami peningkatan dimana laju pertumbuhan sebesar 5,5% menjadi 6,24%. Namun pada tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami penurunan dimana laju pertumbuhan berturut-turut sebesar 5,94%, 5,71%, 5,01% dan mempunyai rata-rata sebesar 5,69% yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat berada dibawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di 4 daerah di Jawa Barat.

4.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur penduduk dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya untuk membangun kualitas hidup masyarakat di suatu negara/daerah. Berikut adalah data yang menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 4 daerah di Jawa Barat yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi. Data dalam penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik di setiap daerah tahun 2011 hingga tahun 2015.

Tabel 4. 5 Indeks Pembangunan Manusia di 4 Daerah di Jawa Barat (2011-2015)

tahun	Daerah (dalam persentase)				rata-rata
	Kota Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung Barat	Kota Cimahi	
2011	78,13%	67,78%	62,36%	74,41%	70,67%
2012	78,30%	68,13%	63,17%	74,99%	71,15%
2013	78,55%	68,58%	63,93%	75,85%	71,73%
2014	78,98%	69,05%	64,27%	76,06%	72,09%
2015	79,67%	70,05%	65,23%	76,02%	72,75%

rata-rata	78,73%	68,72%	65,24%	75,47%	71,84%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan pada tabel 4.5, menunjukkan besar IPM di tiap daerah tidak terlampau jauh berbeda. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IPM adalah Angka Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita, Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup. Kota Bandung mempunyai IPM tertinggi dibanding daerah lainnya, dibuktikan pada tahun 2011 sebesar 78,13% kemudian meningkat pada tahun 2012 sebesar 78,30% dan terus meningkat pada tahun 2013 hingga tahun 2015 berturut-turut sebesar 78,55%, 78,98%, 79,67%, dengan rata-rata keseluruhan sebesar 78,73% yang menunjukkan Kota Bandung berada diatas rata-rata IPM di 4 daerah di Jawa Barat tahun 2011 hingga tahun 2015.

Daerah yang mempunyai capaian IPM terendah adalah Kabupaten Bandung Barat, yaitu pada tahun 2011 sebesar 62,36% kemudian terus meningkat berturut-turut hingga tahun 2015 sebesar 63,17%, 63,93%, 64,27%, 65,23% dengan rata-rata sebesar 65,24% dimana menunjukkan Kabupaten Bandung Barat berada dibawah rata-rata keseluruhan IPM 4 daerah di Jawa Barat selama 5 tahun. Untuk daerah Kabupaten Bandung juga memiliki capaian IPM yang terus meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2015 berturut-turut sebesar 67,78%, 68,13%, 68,58%, 69,05%, 70,05% dengan rata-rata sebesar 68,72%, yang menunjukkan Kabupaten Bandung berada dibawah rata-rata keseluruhan IPM 4 daerah di Jawa Barat selama 5 tahun. Kemudian Kota Cimahi selama 4 tahun berturut-turut memiliki capaian

IPM yang terus meningkat sebesar 74,41%, 74,99%, 75,85%, 76,06% namun menurun di tahun 2015 sebesar 76,02%, dengan rata-rata sebesar 75,47% yang menunjukkan Kota Cimahi berada diatas rata-rata keseluruhan IPM 4 daerah di Jawa Barat dari tahun 2011 hingga tahun 2015.

4.2 Pemilihan Model Uji Efisiensi

Model uji efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini dapat menggunakan 2 asumsi model yakni:

1. Constant Return To Scale, diasumsikan penambahan input akan sebanding dengan output yang dihasilkan dengan DMU berada pada kondisi yang optimal
2. Variable Return To Scale, diasumsikan sebagai penambahan input yang menghasilkan output yang berbeda sehingga menghasilkan kenaikan efisiensi atau penurunan efisiensi.

Pada penelitian efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung ini lebih tepat menggunakan asumsi Variable Return To Scale dengan alasan bahwa penggunaan input variabel pendapatan regional menghasilkan variabel output yang menunjukkan tingkat efisiensi 4 daerah di Jawa Barat yang mengalami kenaikan atau penurunan. Sehingga, kurang tepat jika penelitian ini menggunakan asumsi Constant Return To Scale karena pada kasus ini DMU tidak berada di kondisi optimal.

4.3 Hasil Pengujian

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian adalah DEA dengan menggunakan software DEAP version 2.1, dimana menggunakan

asumsi Variable Return To Scale yang berorientasi pada pendekatan input. Berdasarkan hasil penelitian efisiensi menggunakan DEA, berikut tingkat efisiensi pada masing-masing variabel input dan variabel output pada 4 daerah di Jawa Barat yaitu:

Tabel 4. 6 Hasil Olah Data Kota Bandung 2011-2015

Tahun	Tingkat Efisiensi
2011	1.000
2012	1.000
2013	1.000
2014	1.000
2015	1.000

Sumber: Olah data dengan DEAP 2.1

Berdasarkan tabel 4.6 hasil olah data efisiensi Kota Bandung periode 2011-2015 menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan daerah Kota Bandung yaitu PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah sebagai input terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan IPM sebagai output secara teknis mencapai efisiensi dengan nominal 1.000.

Tabel 4. 7 Hasil Olah Data Kabupaten Bandung 2011-2015

Tahun	Tingkat Efisiensi
2011	0.583
2012	1.000
2013	1.000
2014	0.613

2015	0.767
------	-------

Sumber: Olah data dengan DEAP 2.1

Berdasarkan tabel 4.7 hasil olah data efisiensi Kabupaten Bandung periode 2011-2015 menunjukkan bahwa penerimaan daerah Kabupaten Bandung terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan IPM secara teknis terjadi efisiensi di tahun 2012 dan 2013, sedangkan inefisiensi di tahun 2011, 2014, dan 2015, dibuktikan pada tahun 2011 sebesar 0,583, tahun 2012 sebesar 1.000, tahun 2013 sebesar 1.000, tahun 2014 sebesar 0,613, dan tahun 2015 sebesar 0,767.

Tabel 4. 8 Inefisiensi Kabupaten Bandung 2011-2015

TAHUN	TINGKAT EFISIENSI	ORIGINAL VALUE	PROJECTED VALUE	RADIAL MOVEMENT	SLACK MOVEMENT
2011	0,583				
PAD		291062396.000	169565717332	121496678.668	0.000
DP		1511351819.000	736225708.256	630875815.053	14425095.691
LLPS		1404949566.000	76730534.268	586460869.942	641758161.790
PDRB		5.940	5.940	0.000	0.000
IPM		67.780	67.780	0.000	0.000
2014	0.613				
PAD		702045373.000	430252125.477	271793247.523	0.000
DP		2261962786.000	1329247821.674	875707233.501	57007730.824
LLPS		1074769667.000	136250840.000	416091536.768	170527290.900
PDRB		5.910	5.910	0.000	0.000
IPM		69.060	69.060	0.000	0.000
2015	0.767				
PAD		784216215.000	601454320.455	182761894.545	0.000
DP		3735810392.000	866093829.255	870632067.847	*
LLPS		3775740893.000	537059999.691	879937886.667	*
PDRB		5.980	5.890	0.000	0.000
IPM		70.050	77.100	0.000	7.050

Sumber: hasil olah data

Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa penerimaan daerah Kabupaten Bandung terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan IPM mengalami Inefisiensi yang terjadi pada tahun 2011, input PAD mengalami radial movement sebesar 121496678,668, agar efisien maka Kabupaten Bandung perlu meningkatkan PAD sebesar Rp121.496.678,668. Input dana perimbangan juga mengalami radial movement

sebesar 630875815,053 dan slack movement sebesar 144250295,691, dimana menunjukkan perlunya penambahan dana perimbangan sebesar Rp 630.875.815,053 dan pengurangan dana yang kurang perlu sebesar Rp 144.250.295,691. Pada input lain-lain pendapatan yang sah mengalami radial movement sebesar 586460869,942 dan slack movement sebesar 641758161,790, dimana menunjukkan perlunya penambahan input sebesar Rp 586.460.869,942 dan pengurangan hal yang kurang perlu sebesar Rp 641.758.161,790.

Kemudian inefisiensi pada tahun 2014, input PAD mengalami radial movement sebesar 271793247,523 atau perlunya penambahan PAD sebesar Rp271.793.247,523. Lalu pada input dana perimbangan juga mengalami radial movement sebesar 875707233,501 atau perlunya penambahan dana sebesar Rp875.707.233,501 dan mengalami slack movement sebesar 57007730,824 yang dimana menunjukkan pengurangan dana yang kurang perlu sebesar Rp57.007.730,824. Kemudian input lain-lain pendapatan yang sah mengalami radial movement dan slack movement sebesar 416091536,768 dan 170527290,900 artinya perlunya penambahan dana sebesar Rp416.091.536,768 dan pengurangan dana yang kurang perlu sebesar Rp170.527.290,900.

Inefisiensi pada tahun 2015, output IPM mengalami slack movement sebesar 7,050 yang menunjukkan perlunya peningkatan nominal sebesar 7,050. Pada input PAD mengalami radial movement sebesar 182761894,545 artinya perlu peningkatan sebesar Rp182.761.894,545. Input dana perimbangan juga mengalami radial movement sebesar 870632067,847 dan mengalami slack movement, yang menandakan pemborosan pada penggunaan PAD. Kemudian lain-lain pendapatan

yang sah mengalami radial movement sebesar 879937886,667 yang artinya perlu peningkatan pendapatan sebesar Rp879.937.886,667. Adapun input dana perimbangan juga mengalami slack movement yang menandakan adanya pemborosan, sehingga perlunya pengurangan nominal pada input lain-lain pendapatan yang sah.

Tabel 4. 9 Hasil Olah Data Kabupaten Bandung Barat 2011-2015

Tahun	Tingkat Efisiensi
2011	1.000
2012	1.000
2013	1.000
2014	1.000
2015	0.584

Sumber: Olah data dengan DEAP 2.1

Berdasarkan tabel 4.9 hasil olah data efisiensi Kabupaten Bandung Barat periode 2011-2015 menunjukkan bahwa penerimaan daerah Kabupaten Bandung Barat terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan IPM secara teknis terjadi efisiensi di tahun 2011 hingga 2014 sebesar 1.000, sedangkan inefisiensi di tahun 2015 sebesar 0.584.

Tabel 4. 10 Inefisiensi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015

TAHUN	TINGKAT EFISIENSI	ORIGINAL VALUE	PROJECTED VALUE	RADIAL MOVEMENT	SLACK MOVEMENT
2015	0.854				
PAD		314621269.000	268816074.000	45805195.000	0.000
DP		1159888702.000	628232060.000	168866295.474	362790346.526
LLPS		1159888702.000	289747755.000	102103577.094	309465559.906
PDRB		5.010	5.430	0.000	0.420
IPM		65.230	76.420	0.000	11.190

Sumber: hasil olah data

Pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa penerimaan daerah Kabupaten Bandung Barat terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan IPM pada tahun 2015 mengalami inefisiensi, dibuktikan pada output laju pertumbuhan ekonomi mengalami slack movement sebesar 0,420 yang menunjukkan perlunya peningkatan nominal laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,420. Kemudian pada output IPM juga mengalami slack movement sebesar 11,190 yang menunjukkan perlunya peningkatan nominal IPM sebesar 11,190. Pada input PAD mengalami radial movement sebesar 45805195,000, dimana perlunya penambahan pendapatan sebesar Rp45.805.195,000 untuk mencapai efisiensi. Selanjutnya pada input dana perimbangan mengalami radial movement sebesar 168866295,474, artinya perlu penambahan nominal input sebesar Rp168.866.295,474 untuk mencapai nilai yang efisien. Pada input dana perimbangan juga mengalami slack movement sebesar 362790346,526, artinya perlu mengurangi nominal dana yang bersifat konsumtif sebesar Rp362.790.346,526. Kemudian pada input lain-lain pendapatan yang sah mengalami radial movement sebesar 102103577,094, artinya perlu penambahan nominal pendapatan sebesar Rp102.103.577,094. Slack movement juga terjadi pada input lain-lain pendapatn yang sah sebesar 309465559,906, menunjukkan bahwa perlunya pengurangan jumlah pendapatan yang kurang diperlukan sebesar Rp309.465.559,906.

Tabel 4. 11 Hasil Olah Data Kota Cimahi 2011-2015

Tahun	Tingkat Efisiensi
2011	1.000
2012	1.000

2013	1.000
2014	1.000
2015	1.000

Sumber: Olah data dengan DEAP 2.1

Berdasarkan tabel 4.6 hasil olah data efisiensi Kota Cimahi periode 2011-2015 menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan daerah Kota Bandung yaitu PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah sebagai input terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan IPM sebagai output secara teknis mencapai efisiensi dengan nominal 1.000.

4.4 Pembahasan

Tabel 4. 12 Nilai Efisiensi 4 Daerah di Jawa Barat Tahun 2011-2015

Tahun	Daerah				Rata-rata
	Kota Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung Barat	Kota Cimahi	
2011	1,000	0,583	1,000	1,000	0.895
2012	1,000	1,000	1,000	1,000	1.000
2013	1,000	1,000	1,000	1,000	1.000
2014	1,000	0,613	1,000	1,000	0.903
2015	1,000	0,767	0,854	1,000	0.905

Sumber: data diolah menggunakan DEAP 2.1

Berdasarkan pada tabel 4.12, menunjukkan nilai efisiensi keseluruhan di 4 Daerah di Jawa Barat periode 2011 hingga 2015 dalam pengalokasian pendapatan regional berupa PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan IPM. Diketahui bahwa Kota Bandung tahun 2011 hingga 2015 menghasilkan nilai efisiensi sebesar 1.000 yang menunjukkan bahwa pengalokasian pendapatan regional dalam mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi yang baik dan kesejahteraan masyarakat sudah tepat sasaran dan optimal. Kemudian Kabupaten Bandung menghasilkan efisiensi relatif sebesar 1.000 hanya pada tahun 2012 dan 2013, sedangkan pada tahun 2011, 2014, dan 2015 menghasilkan inefisiensi sebesar 0.583, 0.613, 0.767, dimana menunjukkan belum optimalnya pengalokasian pendapatan regional dan pengembangan SDA pada Kabupaten Bandung, sehingga tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum sesuai yang diharapkan. Pada Kabupaten Bandung Barat tahun 2011 hingga 2014 dapat dilihat menghasilkan efisiensi relatif sebesar 1.000, namun pada tahun 2015 menghasilkan inefisiensi sebesar 0,854. Hal ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dalam efisiensi penggunaan pendapatan regional Kabupaten Bandung Barat. Kemudian Kota Cimahi tahun 2011 hingga 2015 menghasilkan efisiensi relatif sebesar 1.000 yang menunjukkan konsistensi dan optimalisasi penggunaan pendapatan regional terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan IPM.

Pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa 4 Daerah di Jawa Barat mempunyai ciri konsistensi dalam menghasilkan tingkat efisiensi yang berbeda. Pada Kota Bandung dan Kota Cimahi periode 2011 hingga 2015, kedua daerah tersebut

konsisten dalam menjaga tingkat efisiensi relatif, sehingga cenderung terus menghasilkan tingkat efisiensi relatif hingga beberapa tahun kedepan. Namun pada Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, lebih cenderung mengalami fluktuasi di tiap tahunnya dalam menghasilkan tingkat efisiensi relatif dalam alokasi pendapatan regional di kedua daerah tersebut. Sehingga dapat diketahui rata-rata nilai efisiensi pada 4 Daerah di Jawa Barat lebih cenderung menghasilkan hasil yang fluktuatif.

